

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. KAJIAN PUSTAKA

##### a. Definisi Komunikasi Politik

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo - Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata “polis” ini berkembang menjadi “*politicos*” yang artinya kewarganegaraan. Dari kata “*politicos*” menjadi “*politera*” yang berarti hak-hak kewarganegaraan.<sup>21</sup>

Definisi Komunikasi Politik - Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan perpecahan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.<sup>22</sup>

Bagi Lasswell, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan David Easton dalam Sumarno, mendefinisikan politik sebagai

---

<sup>21</sup> Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989), hal.108.

<sup>22</sup> Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, (bandung: remaja rosdakarya 1999), hlm. 120.

berikut: *Political as a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior”*

Dalam definisi ini David Easton<sup>23</sup> menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Mengenai komunikasi politik ini (*political communication*) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik “an sich”, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau

---

<sup>23</sup>Ibid. Hal. 120

ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.

Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

### **1. Ciri Komunikator politik**

Menurut Nimmo,<sup>24</sup> salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator politik. Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidak-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat.

---

<sup>24</sup> Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989).Hal.25.

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik dalam proses opini, Leonard W. Dood,<sup>25</sup> menyarankan jenis-jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka: "Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalinya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi.

Berdasar pada anjuran Doob, jelas bahwa komunikator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu.

## **2. Politikus Sebagai Komunikator Politik**

Kelompok ini adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek utama dalam kegiatan ini. Meskipun politikus melayani

---

<sup>25</sup>Henri, ida. *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. jakarta, kencana, 2012. Hal. 24.

beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel Katz,<sup>26</sup> menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkungannya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.<sup>27</sup>

### **3. Profesional sebagai komunikator politik**

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua

---

<sup>26</sup>Ibid. Hal. 24.

<sup>27</sup>Ibid. Hal. 25

dimensi utama: munculnya media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan.

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey<sup>28</sup> adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama.

Bagaimanapun, karena menjadi komunikator profesional, bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis politik.

Dalam definisi diatas menunjukkan bahwasanya komunikasi politik lebih di titik tekankan pada proses politik yang berlangsung sesuai dengan sistem yang sudah ada. Idealis sebuah negara disini mulai di prioritaskan karena negara adalah sebuah media yang bisa mengemplementasikan segala hal yang di lakukan oleh warga .

Pengertian tersebut menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu-individu yang berada dalam lingkup sistem politik yang mencerminkan suatu bangunan kehidupan negara dengan segala kompleksitasnya untuk mencapai ideal negara,

---

<sup>28</sup>Ibid. Hal. 24.

sehingga akan tampak jelas perpaduan seluruh unsur yang ada dalam lingkup negara adalah produk komunikasi politik. Karena itu komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampakkan karakter sebagai identitas keilmuan, baik sebagai ilmu murni (*pure science*) yang bersifat ideal dan berada dalam lingkup "*das sollen*". (apa yang seharusnya) maupun sebagai ilmu terapan yang berada dalam dunia empiris (dunia nyata) dalam lingkup wilayah "*das sein*".

#### 1. **Hakikat Komunikasi Politik**

Secara filosofis hakikat komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Hakikat kehidupan sebagai motif atau sebagai keinginan yang mendorong manusia untuk berkiprah yang mengarah kepada terpenuhinya tersebut.

Komunikasi politik menjadi disiplin ilmu pada awal tahun 1950-an, istilah komunikasi politik pertama kali di kemukakan secara tegas oleh Euleau, eldersveld, dan janowitz pada tahun 1956. Sejalan dengan munculnya perubahan baru itu terbit pula kajian-kajian politik yang mendudukan komunikasi sebagai faktor penting dalam politik. Komunikasi politik mempunyai salah satu fungsi yang sangat penting dalam sistem politik.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, (bandung: remaja rosdakarya 1999), hlm. 2.

## 2. Unsur-unsur Komunikasi Politik

Sebagaimana unsur-unsur komunikasi pada umumnya, maka komunikasi politik terdiri dari beberapa unsur yaitu: komunikator politik, komunikan, isi komunikasi (pesan-pesan) media komunikasi, tujuan komunikasi, efek, dan sumber komunikasi.<sup>30</sup>

Setiap unsur jelas fungsinya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi primer komunikasi politik yaitu tujuan komunikasi. Dalam komunikasi politik, maka fungsi primer komunikasi melembaga dengan fungsi primer negara sesuai sistem politik yang melandasinya.<sup>31</sup>

### a. Komunikasi Politik.

Dalam komunikasi politik yang dimaksud komunikator, yaitu individu-individu yang berada dalam suatu instansi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara.

Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi, yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan

---

<sup>30</sup> Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Humas Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hal. 3.

<sup>31</sup> Ibid. Hal. 3.

kebijaksanaan nasional. Karena itu sebagai komunikator politik diuntut berbagai persyaratan agar proses komunikasi mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu:

- 1) Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan.
- 2) Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung.
- 3) Berorientasi kepada kepentingan negara.
- 4) Memiliki kedewasaan emosi (*emotional intelligence*)
- 5) Jauh dari sikap hipokrit (*cognitive dissonance*)

Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa. Sedangkan elit yang tidak duduk pada struktur kekuasaan-kekuasaan disebut elit masyarakat yaitu elit yang paling besar jumlahnya, karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan.<sup>32</sup>

b. Komunikasikan.

Komunikasikan adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek yang dituju oleh komunikator (pengirim/penyampai pesan), yang menerima pesan-pesan (berita, informasi, pengertian) berupa lambang-lambang yang mengandung arti atau makna.

---

<sup>32</sup>Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*. Bandung, PT Rosda Karya, 2010. Hal. 5.

c. Isi (pesan-pesan) komunikasi.

Isi (pesan-pesan) komunikasi merupakan produk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasikan kedalam simbol-simbol sesuai lingkup kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi akan terdiri dari:

- 1) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transmisi pesan.
- 2) Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung.
- 3) Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integrative bagi penghuni sistem.
- 4) Karakteristik yang menunjukkan identitas negara.
- 5) Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Dari ungkapan diatas memberi informasi bahwa komunikasi didalam prosesnya berada pada struktur formal. Pesan-pesan komunikasi mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran.<sup>33</sup>

d. Media Komunikasi

Dalam sistem politik yang bagaimana pun bentuk dan sifatnya, maka media komunikasi mendapat tempat yang cukup penting. Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat

---

<sup>33</sup>Ibid. Hal. 5.

untuk mendapat legitimasi rakyat didalam melakukan kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah direpresentasikan kedalam simbol-simbol kekuasaan.

e. Tujuan komunikasi

Dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi selalu berhimpit (bahkan melembaga) dengan tujuan negara untuk mencapai tujuan tersebut, maka sumber-sumber komunikasi dikelola secara bijak melalui perencanaan yang matang dan terarah. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasarinya. Hal ini akan tampak jelas dari ideal normatif negara yang tertuang dalam ketentuan normatif masing-masing sistem.

f. Efek komunikasi

Efek adalah hasil dari penerimaan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikator menerima pesan. Efek dapat berlanjut dengan pemberian respon tanggapan atau jawaban yang disebut umpan balik atau feedback. Feedback adalah arus balik yang berupa tanggapan atau jawaban dalam rangka proses komunikasi yang bertujuan untuk saling pengertian atau memperoleh kesepakatan bersama.

g. Sumber komunikasi politik

Sumber (source) sangat menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai asal keluarnya, di peroleh atau munculnya isu, informasi yang dapat di jadikan materi pesan komunikasi. Sumber dapat berasal dari individu karena idenya yang sangat berharga, atau dapat pula bersumber dari elit politik dan dapat pula berasal dari suatu faham.

Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator dalam memotivasi komunikan untuk berbuat sesuatu sesuai kebijaksanaannya yang telah di tetapkan komunikasi elit berkuasa.

### **3. Obyek kajian komunikasi politik**

Dalam kajian komunikasi politik sikap prilaku penguasa merupakan pokok bahasan atau objek kajian utama, karena sikap prilaku penguasa merupakan warna dominan dan tolak ukur untuk menentukan dalam sistem politik sejauh apa proses komunikasi politik berlangsung. Sikap prilaku penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap trasformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal maupun yang berkembang dalam masyarakat.

#### **a. Teori tipe**

Teori ini di ungkapkan oleh dan nimmo yang mengklasifikasikan orang ke dalam kategori-kategori berdasarkan karakteristik yang dominan atau tema pokok yang timbul berulang kali dala prilaku

mereka. Meskipun kebanyakan upaya untuk menguraikan kepribadian politik yang telah menerapkan teori tipe berfokus pada karakter dan gaya pemimpin politik.<sup>34</sup>

Disini perhatian kita adalah mereka yang telah menggunakan teori tipe untuk memperhitungkan bagaimana khalayak komunikasi politik menanggapi dengan berbagai cara. Contoh dari analisis diatas yang lebih tepat ialah bagaimana menelaah perbedaan perbedaan dalam kepribadian berbagai kelompok.

1. Golongan in-aktif ialah golongan yang tidak berpartisipasi dalam organisasi politik atau sosial di daerahnya, mereka sama-sama memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam organisasi politik.
2. Golongan konstruktivis ialah golongan yang bekerja pada organisasi tertentu atau pada proyek pelayanan sosial, tapi jarang menjadi protes yang terorganisasi.
3. Golongan aktivis ialah golongan yang selalu ngajukan protes akan kekecewaan mereka terhadap para pememimpin yang di nilai mempunyai prestasi buruk dan jga turut dalam memperbaiki citra tersebut. mereka lebih peka, independen dan bertanggung jawab.
4. Golongan pengingkar ialah golongan yang selalu tidak searah atau selalu kontradiksi dalam melaksanakan kepribadian politik, karena serba membolehkan setiap yang di anggapnya benar. Tipe masyarakat ini tidak bisa memiliki kedudukan yang jelas di

---

<sup>34</sup> Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989), hal.108.

bandingkan dengan masyarakat yang taat. Karena partisipasi politik sangatlah penting untuk menentukan masa depan sebuah negara.

Partisipasi politik merupakan masalah yang selalu di hadapi oleh setiap negara, karena partisipasi politik berkaitan erat dengan kelangsungan suatu negara. Partisipasi politik merupakan tolak ukur dalam memahami kualitas warga negara pada tingkat rujukan dan tanggung jawab atas kemajuan dan kelangsungan hidup masyarakat atau mengetahui sistem politik apa yang mendasari partisipasi tersebut dari sifat ataupun orientasi politiknya. Adapun bentuk partisipasi politik disini terdapat beberapa aspek sebagai berikut.

#### 1. Pengertian partisipasi politik

Robert p. Clark seorang guru besar pada universitas george meason, mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik dalam bukunya menyatakan bahwa perkataan “partisipasi politik” dapat diartikan berbeda-beda bergantung kepada kultur politik (budaya politik) yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut.<sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwasanya partisipasi politik dapat bersifat perorangan ataupun kelompok, di organisasikan atau secara spontan secara baik-baik atau dengan kekerasan.

Partisipasi tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia yang muncul karena kesadaran, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar, karena partisipasi bersifat berubah. Partisipasi yang kekal

---

<sup>35</sup>Rochayat harun, sumarno, op. cit. Hal. 130.

adalah partisipasi yang timbul dari hati sendiri, karena merasa bahwasanya dirinya adalah bagian dari negara yang di tuntut untuk memikirkan dan memajukan negara.

Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik warga negara atau masyarakat yang berwujud dalam prilaku baik secara psikis maupun fisik. Prilaku politik dalam wujud partisipasi politik dalam berlangsung secara konvensional. partisipasi yang langsung bersifat legal dan berada dalam ikatan normatif. Partisipasi politik seperti inilah yang dikatakan partisipasi yang lahir dari hati nurani tanpa ada paksaan.

## 2. Dimensi partisipasi politik

Individu atau kelompok mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara itu dibagi dalam tiga dimensi : gaya umum partisipasi, motif yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekwensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.<sup>36</sup>

### a. Gaya partisipasi

Mengacu pada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya, sebagai gaya pembicaraan politik yang singkat dan bertele-tele.

#### - Langsung

Ada orang yang melibatkan diri secara langsung dengan hubungan yang terus menerus dengan figur politik.

---

<sup>36</sup>Dan nimmo, loc. Cit. Hal. 145.

- Sistematis

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan untuk melakukan sesuatu bersifat konsisten.

- a. Motif

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu faktor seperti itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini seperti gaya partisipasi yang di berikan berbeda-beda dalam beberapa hal.

- Sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa menjadi berpengetahuan mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintah.

- Rasional

Masyarakat yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya atau di sebut bermotivasi rasional.

#### 4. Pendapat umum (*public opinion*)

Emory S. Bogardus dalam buku “*public opinion and propaganda*” mengangkat empat macam kompetensi pendapat umum, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Pendapat umum dapat memperkuat undang-undang, karena tanpa dukungan pendapat umum maka undang-undang akan merupakan deretan huruf mati.
- b. Pendapat umum memberi kekuatan hidup bagi institusi-institusi atau lembaga kemasyarakatan (*sosial institutions*).
- c. Pendapat umum merupakan pendukung dasar moral masyarakat.

Dengan mengetahui opini publik yang sesungguhnya, kebijaksanaan yang diambil bisa disesuaikan, dimodifikasi, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya benturan psikologis, ataupun unjuk rasa dimasyarakat.

Mempertimbangkan pendapat umum dalam proses pengambilan keputusan bukan berarti elite dalam struktur sosial selalu menjadi pihak yang harus mengalah, sehingga otoritas tak bisa membedakan pembagian nilai lagi, tak ada bedanya antara pemimpin dan bawahan. Bukan itu maksudnya! Memahami pendapat umum berarti memiliki data yang akurat mengenai, bagaimana dan kapan waktu yang tepat meluncurkan suatu kebijaksanaan.

Kebijaksanaan yang tidak memperoleh respon dari masyarakat bukan semata karena kebijaksanaan itu belum dimengerti atau diterima sebagai bagian nilai-nilai bersama. Khalayak (komunitas) belum merasakan kebijaksanaan itu

---

<sup>37</sup> Emory S. Bogardus, *The Marketing Public Opinion* (Association press, New York, 1991).

penting baginya, sehingga merasa tidak ikut memiliki. Bagaimana mungkin akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap nilai-nilai tersebut.

Dalam komunikasi politik terdapat teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi politik, secara garis besar teori ini terbagi pada dua macam yaitu teori kepribadian dan diri politik.

Jumlah teori tentang kepribadian sama banyaknya dengan jumlah defenisinya. Pada tulisan ini akan difokuskan pada beberapa saja diantaranya, tetapi lebih spesifik pada yang memberikan gambaran tentang belajar politik.

Dalam buku *Theories of Human Communication* karangan Little John, dikatakan bahwa studi retorika sesungguhnya adalah bagian dari disiplin ilmu komunikasi. Mengapa? karena di dalam retorika terdapat penggunaan simbol-simbol yang dilakukan oleh manusia. Karena itu Retorika berhubungan erat dengan komunikasi Persuasi. Sehingga dikatakan retorika adalah suatu seni dari mengkonstruksikan argumen dan pembuatan pidato. Little John mengatakan retorika adalah " *adjusting ideas to people and people to ideas*".

## **B. KAJIAN TEORI**

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tipe dan tindakan sosial, selain dari teori tipe teori tindakan sosial juga digunakan peneliti untuk menghasilkan temuan-temuan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Teori tipe**

Teori ini di ungkapkan oleh dan nimmo yang mengklasifikasikan orang ke dalam kategori-kategori berdasarkan karakteristik yang dominan atau tema pokok yang timbul berulang kali dala prilaku mereka. Meskipun kebanyakan upaya untuk menguraikan kepribadian politik yang telah menerapkan teori tipe berfokus pada karakter dan gaya pemimpin politik.<sup>38</sup>

Disini perhatian kita adalah mereka yang telah menggunakan teori tipe untuk memperhitungkan bagaimana khalayak komunikasi politik menanggapi dengan berbagai cara. Contoh dari analisis diatas yang lebih tepat ialah bagaimana menelaah perbedaaan perbedaan dalam kepribadian berbagai cara. Contoh yang sangat baik dari analisis demikian ialah menelaah perbedaan-perbedaan dalam kepribadian berbagai kelompok.

- a. Golongan in-aktif ialah golongan yang tidak berpartisipasi dalam organisasi politik atau sosial di daerahnya, mereka sama-sama memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam organisasi politik.
- b. Golongan konstruktivis ialah golongan yang bekerja pada organisasi tertentu atau pada proyek pelayanan sosial, tapi jarang menjadi protes yang terorganisasi.
- c. Golongan aktivis ialah golongan yang selalu ngajukan protes akan kekecewaan mereka terhadap para pememimpin yang di nilai mempunyai prestasi buruk dan jga turut dalam memperbaiki citra tersebut. mereka lebih peka, independen dan bertanggung jawab.

---

<sup>38</sup> Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989), hal.108.

d. Golongan pengingkar ialah golongan yang selalu tidak searah atau selalu kontradiksi dalam melaksanakan kepribadian politik, karena serba membolehkan setiap yang di anggapnya benar. Tipe masyarakat ini tidak bisa memiliki kedudukan yang jelas di bandingkan dengan masyarakat yang taat. Contoh sifat yang seperti ini menjadi virus yang berpotensi merusak lingkungan atau kelompok masyarakat.

Kebaikan atau kekurangan seperti contoh diatas bukan pokok masalah, malinkan hanya contoh tentang bagaimana masyarakat mencoba menerangkan politik sebagai refleksi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan teori tipe bukan menunjukkan kecendrungan yang menentukan prilaku yang memisahkan orang terhadap satu sama lain.

## 2. Teori Tindakan Sosial

Mempelajari tindakan sosial, weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman, dalam kaitannya dengan penelitian ini, disini peneliti harus mencoba menginterpretasikan tindakan siaktor, harus memahami motif dari tindakan si aktor. Untuk itu peneliti harus melakukan dua tindakan dalam penelitian. Pertama dengan melalui kesungguhan dalam usaha untuk memahami terhadap tindakan si aktor. Kedua dengan mencoba mengeangkan dan menyelami pengalaman siaktor.

Weber memberikan klasifikasi prilaku sosial sebagai berikut :

- a. kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan
- b. kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai seperti nilai estetis, politik, keagamaan dan lain-lain.

c. kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang, (kelakuan efektif atau emosional).

d. kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi (kelakuan tradisional)<sup>39</sup>

weber membedakan adanya empat macam rasionalitas yang mendasari tindakan sosial. Semakin rasional, tindakan sosial akan semakin mudah dipelajari.

Keempat macam rasionalitas tindakan tersebut adalah :

a. zwerkational, yaitu tindakan sosial murni dimana si aktor tidak hanya menilai cara terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam zwerk rasional tidak absolut. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional, maka mudah untuk memahami tindakannya tersebut.

b. werkrational action, dalam tindakan tipe ini, aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan sebuah cara yang paling tepatataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional. Karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang di inginkan. Tindakan tipe kedua ini masih dapat di kategorikan rasional. Meskipun tingkat rasionalitasnya berada di bawah tipe yang pertama. Tindakan yang masuk dalam kategori tipe kedua ini masih dapat di pertanggung jawabkan untuk dipahami.

---

<sup>39</sup> George ritzer, sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda, (jakarta: raja grafindo persada, cet. 4, 2003), h, 38.

- c. affectual action, yang merupakan tindakan yang di buat-buat. Tindakan ini di pengaruhi oleh emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.
- d. Traditional action, yaitu tindakan yang di dasarkan atas kebiasaan-kebiasaan mengerjakan sesuatu di masalalu saja.

Teori tindakan ini dapat digunakan untuk mengenterpretasikan tindakan-tindakan pelaku dan memahami rasionalitas di balik tindakan pelaku tersebut. sejalan dengan penelitian tentang peran kiai kampung dalam komunikasi politik. Kita dapat melakukan interpretasi terhadap tindakan-tindakan sosial bentuk-bentuk peran kiai yang di kategorikan dalam partai politik serta memahami motif apa yang mendasari mereka melakukan atau memilih peran tersebut. dengan menggunakan kerangka pandang dalam teori ini, diharap dapat mengungkap lebih jauh dari terhadap apa yang melandasi atau motif dari aktor dalam penelitian ini.